

DISKURSUS INTELEKTUAL, *CIVIL SOCIETY*, DAN POLITIK: Potret Lima Tahun Terakhir NU



Syafiq Hasyim

Deputi Direktur International Center for Islam and Pluralism (ICIP) dan Redaktur Jurnal Tashwirul Afkar

Selama 5 tahun terakhir ini, setidaknya ada tiga hal penting—dalam derajat yang berbeda-beda—yang secara bersama-sama mewarnai kehidupan Nahdlatul Ulama (NU), yaitu diskursus intelektual, *civil society* dan politik. Dua diskursus pertama, intelektual dan *civil society*, telah menjadi corak utama NU pasca Khittah 1926. Kepemimpinan Abdurrahman Wahid, selama tiga periode

kepemimpinan di dalam NU (1984-1999), telah memberikan sumbangan yang sangat penting dalam mengembangkan dua diskursus di atas. Dua periode pertama kepemimpinan Wahid (1984-1994), NU telah berhasil menciptakan suatu periode yang paling cemerlang dalam sejarah NU bagi perkembangan diskursus intelektualitas dan *civil society*. Keterlibatan aktivis-aktivis dan kalangan intelektual NU dalam gerakan-gerakan prodemokrasi dan hak asasi manusia, munculnya pelbagai lembaga swadaya masyarakat dan jaringan-jaringan *civil society*, serta kebangkitan pesantren dalam kerja-kerja *civil society* merupakan contoh kesuksesan NU dalam mengawal gerakan intelektual dan *civil society*. Perkembangan yang sangat baik pada saat itu tidak lepas dari model kepemimpinan yang dikembangkan Gus Dur yang kritis dan non-kompromis.¹ Hal ini cocok dengan situasi yang dihadapi NU pada saat itu,

¹ Istilah non-kompromis diberikan oleh Martin membaca sikap Gus Dur pada periode-periode awal kepemimpinannya di NU. Menurut Martin, Wahid adalah orang yang berjasa besar di balik usaha melibatkan pesantren dalam kerja-kerja kemasyarakatan (*community development*) dengan cara menghubungkan pesantren-pesantren tersebut dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri. Lihat Martin van Bruinessen, "Indonesia's Ulama and Politics: Caught between Legitimising the Status Quo and Searching for Alternatives", *Prisma—The Indonesian Indicator* (Jakarta), No. 49 (1990), 52-69. Atau lihat http://www.let.uu.nl/~martin.vanbruinessen/persoanl/publications/Ulama_and_politics.htm

yaitu situasi ditinggalkan dan dimarginalkan² terutama dalam bidang ekonomi, politik, dan pendidikan. Dengan model ini, Gus Dur menawarkan semacam harapan dan identitas baru bagi kaum *nahdliyyin* melalui pengembangan intelektualitas dan *civil society*.

Namun dua diskursus di atas lalu mengalami tambahan baru sesuai dengan perkembangan politik di Indonesia pasca kejatuhan rejim Soeharto, 1998. NU yang tadinya lebih mengonsentrasikan diri pada agenda-agenda intelektual dan *civil society*, semenjak kejatuhan rejim Soeharto mulai memikirkan kembali untuk terjun ke politik praktis. Hal ini terjadi mungkin karena suasana politik kenegaraan yang mendukung, seperti reformasi dan keterbukaan di pelbagai bidang kehidupan. Meskipun banyak kalangan yang merasa kecewa dengan adanya pemikiran kembali ke politik, namun akhirnya PBNU memutuskan pembentukan sebuah partai politik yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PKB inilah yang pada akhirnya menjadikan NU lebih terlibat lagi dalam persoalan-persoalan politik praktis, karena PBNU hanya mengakui PKB sebagai satu-

satunya partai politik yang dilahirkan olehnya. Partai di luar PKB bukanlah partai resmi NU.³ Penggambaran pembentukan PKB ini sangat penting dikemukakan karena dari sinilah kemudian persoalan-persoalan yang berkaitan dengan relasi antara NU dan politik pada masa-masa berikutnya lahir. Dengan kata lain, warna politik inilah yang dalam waktu sekitar 5-6 tahunan—dimulai semenjak berdirinya PKB dan kepresidenan Gus Dur—belakangan menjadi perhatian utama dari NU sehingga mengalahkan dua hal penting di atas.

Tulisan ini akan melihat NU dalam rentang waktu lima tahun terakhir ini melalui tiga hal. *Pertama*, diskursus intelektual (bagaimana perkembangan diskursus intelektual di lingkungan NU selama 5 tahun terakhir?). *Kedua*, *civil society* (bagaimana kondisi *civil society* selama 5 tahun terakhir, apakah masih kuat atau justru semakin melemah?). *Ketiga*, politik (bagaimana NU secara kelembagaan menyikapi persoalan politik praktis terutama kaitannya dengan penegakan Khittah '26?).

² Istilah ditinggalkan dan dimarginalkan mengandung makna kesengajaan (tidak alamiah), di mana pemerintah masa lalu, terutama di bawah rezim Suharto, NU secara sengaja dianaktirikan oleh pemerintah. Sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU mungkin dianggap memiliki kekuatan yang mengancam, karenanya keberadaannya harus dikerdilkan.

³ Dalam sebuah *talkshow* di TPI menjelang Pemilu 1999, KH. Abdurrahman Wahid mengeluarkan pernyataan yang sangat kontroversial berkenaan dengan hubungan partai-partai yang berbasis NU, sebab pada saat itu ada tiga lebih partai yang mengidentikkan diri sebagai partai NU. Ia mengibaratkan partai politik di lingkungan NU dengan sesuatu yang keluar dari pantat ayam. Menurutnya, PKB ibarat telur dan partai yang lain ibarat tahi ayam. Meskipun pernyataan ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi politik PKB di mata warga NU, namun pernyataan ini mengundang banyak tanggapan.



Diskursus Intelektual

Apa yang saya maksud dengan diskursus intelektual NU di sini adalah segala macam bentuk perbincangan dan aktivitas yang mengarah kepada representasi perkembangan intelektualitas di lingkungan NU, khususnya selama lima tahun terakhir. Karena itu, perhitungan ini akan dimulai sejak Muktamar NU XXX tahun 1999 di Kediri. Muktamar ini memiliki posisi yang sangat penting dalam perjalanan NU karena Muktamar tersebut bisa

dikatakan sebagai “tonggak masa peralihan”. Dari segi kepemimpinan, dalam Muktamar tersebut terjadi peralihan kepemimpinan dari KH. Abdurrahman Wahid ke KH. Hasyim Muzadi. Karena berbeda orang, dipastikan gaya kepemimpinannya pun akan berbeda. Dari segi politis, terjadi perubahan dari tidak ada unsur politik di dalam NU menjadi ada, yaitu berdirinya PKB. Keberadaan PKB sudah barang tentu akan menimbulkan situasi yang berbeda pada kepemimpinan Hasyim Muzadi.

Desus-desus menjelang Muktamar NU Kediri pada 1999 tentang siapa yang paling tepat memimpin NU pasca KH. Abdurrahman Wahid berkembang di sekitar dua tokoh⁴, yaitu, KH. Hasyim Muzadi dan KH. Said Aqiel Siradj. Dua-duanya adalah orang dekat Gus Dur. Hasyim Muzadi pernah menjadi pembela Gus Dur pada saat Muktamar Cipasung dan Said Aqil Siradj adalah seorang alumni sebuah universitas di Madinah yang mendapatkan promosi dari Gus Dur yang tidak pernah didapatkan oleh kader lain. Pada waktu itu, ada dua kemungkinan yang dibayangkan oleh warga NU terhadap dua tokoh ini. Apabila Hasyim memimpin NU, maka NU akan mendapatkan penataan yang baik karena Hasyim dikenal sebagai

⁴ Di luar dua tokoh ini, sebenarnya masih ada dua calon lagi yang masuk ke bursa pencalonan, pertama, Salahudin Wahid (Gus Salah) dan Ahmad Bagdja. Gus Salah tidak mendapat dukungan yang kuat karena beberapa kalangan dicurigai sebagai “susupan” calon dari ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia) mengingat kedekatan tokoh ini dengan kalangan ICMI. Sedangkan Ahmad Bagdja yang seharusnya mendapatkan dukungan dari wilayah Jawa Barat kalah popularitas dengan Said Aqiel Siradj yang juga mendapat dukungan luas dari wilayah yang sama.

pemimpin NU wilayah yang mampu dan berhasil mengembangkan NU dalam citra manajemen yang baik. Paling tidak inilah yang seringkali kita dengar atas kelebihan Hasyim. Apabila Said Aqil Siradj yang menang, maka NU akan mendapatkan pasokan intelektual yang segar karena janji Said pada saat itu adalah mengirimkan 1000 pemuda NU untuk belajar ke luar negeri setiap tahunnya. Karena pidato Said Aqil Siradj sebagai ketua panitia Muktamar saat itu tidak begitu simpatik dan seolah-olah menggeser tradisi lama dalam NU dan langsung mendapatkan kritik tajam dari Gus Dur yang pada saat itu menjabat presiden RI, maka Hasyimlah yang akhirnya mendapatkan suara terbanyak dari *muktamirin* (peserta muktamar).

Kemenangan Hasyim Muzadi disambut baik oleh pelbagai kalangan, karena nampaknya pola kepemimpinannya dianggap tepat untuk melanjutkan Gus Dur. Artinya, aspek manajerial yang sangat diharapkan dari kepemimpinan Hasyim Muzadi. Perlunya seorang manager yang mampu berperan mengembangkan lebih maju lagi diskursus intelektualitas NU inilah yang sangat diharapkan dari kehadiran Hasyim Muzadi, mengingat aspek intelektualitas NU pada masa kepemimpinan Gus Dur sudah mengalami perkembangan yang signifikan.

Harapan seperti ini sebenarnya terlalu jauh dicagarkan dari kepemimpinan KH. Hasyim Muzadi, mengingat pemimpin yang baru pasti akan memiliki gaya kepemimpinan yang baru dan berbeda

dengan kepemimpinan sebelumnya, Gus Dur. Pengembangan diskursus intelektual membutuhkan seorang pemimpin yang sangat kuat dalam bidang ini, sedangkan sisi yang paling menonjol dari Hasyim Muzadi bukanlah sisi intelektualnya, akan tetapi sisi menagamennya. Belum lagi ada hal yang dilupakan bahwa perkembangan diskursus intelektual di lingkungan NU yang dimotori oleh Gus Dur masih sangat bersifat elitis dan terbatas pada kaum muda NU di wilayah perkotaan, khususnya yang terpusat di Jakarta. Meskipun KH. Hasyim Muzadi sudah memiliki kontak dengan tokoh-tokoh tersebut, namun karena dia tinggal di Jawa Timur, maka ia memerlukan waktu yang sangat lama untuk mengembangkan jaringan ini. Namun, ini semua bukan merupakan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan.

Modal yang cukup baik dalam pengembangan diskursus intelektual yang diletakkan Gus Dur sebenarnya sudah lumayan cukup untuk dikembangkan lebih lanjut oleh kepemimpinan NU berikutnya. Namun, karena pada saat terjadinya peralihan kepemimpinan tersebut NU sedang dilanda euforia kekuasaan politik berkenaan dengan kepresidenan Gus Dur, maka nyaris semua energi NU dikerahkan untuk menjaganya.

Menjelang akhir kepemimpinan Gus Dur di NU, diskursus intelektual NU sebenarnya pernah diramaikan dengan persoalan perlunya melakukan reinterpretasi atas makna Aswaja, namun persoalan ini kemudian ditelan oleh hiruk-pikuk persoalan politik yang memiliki

akseptibilitas lebih tinggi di lingkungan NU. Sebagaimana kita tahu bahwa kontroversialitas Gus Dur dalam menjalankannya kepresidenannya menjadikan tidak hanya PKB yang sibuk untuk menjelaskan segala ucapan, tindakan, dan kebijakan Gus Dur, akan tetapi juga NU menjadi terlibat. Dalam konteks inilah Hasyim Muzadi sudah mulai terlibat masuk ke dalam perkara politik yang selayaknya tidak dimasukinya. Namun demikian, upaya KH. Hasyim Muzadi untuk ikut masuk dalam arena ini bisa dimaklumi baik dari sisi pribadi maupun sisi kelembagaan. Secara pribadi, pengaruh Gus Dur atas terpilihnya Hasyim sebagai ketua umum PBNU sangatlah besar sehingga sangat wajar apabila dia ikut membela Gus Dur. Secara kelembagaan, meskipun NU bukan partai politik, namun paling tidak NU bisa memberikan dukungan moral terhadap keterpojokan Gus Dur. Urusan politik dan juga keterjebakan KH. Hasyim Muzadi untuk bermain di wilayah ini ujungnya berdampak pada involusi diskursus dan gerakan intelektual di lingkungan NU, bahkan bisa dikatakan mundur apabila dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya.

Pasca kejatuhan Gus Dur sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh kepemimpinan NU yang baru ini untuk kembali melakukan konsolidasi intelektualitas NU setelah selama dua tahun *vacuum* akibat perha-

tian NU yang tertuju pada kepresidenan Gus Dur. Sayangnya, KH. Hasyim Muzadi lagi-lagi terjebak dalam kubangan politik ketika ia ikut serta menyelesaikan konflik internal di partai yang dibidani oleh NU.⁵ Bisa jadi, pilihan Muzadi untuk ambil bagian dalam drama perpecahan PKB hanyalah semacam tindakan moral. Namun, sebenarnya KH. Hasyim Muzadi bisa tidak terlibat kalau dia menolak untuk ikut campur dalam konflik PKB. Bantuan untuk menyelesaikan persoalan PKB yang ditawarkannya malah menimbulkan persepsi dari pihak PKB akan keabsahan disersi Matori. Ini dibuktikan dengan pertemuan-pertemuan Hasyim Muzadi dengan Matori, yang tindakan ini malah kian memperkeruh suasana. Hasyim semakin terjebak dalam urusan politik PKB dan agenda pengembangan diskursus intelektual kembali terlupakan.

Sebenarnya fungsi pengembangan intelektualitas di dalam NU tidak hanya menjadi tanggung jawab pemimpin Tanfidziyyah semata, tetapi juga Syuri'ah yang menjadi lembaga tinggi di NU. Perlu diketahui bahwa NU merupakan organisasi keagamaan yang berbasis agraris dan memiliki corak paternalistik yang cukup tinggi, sehingga inisiatif pengembangan diskursus intelektual yang dimulai dari kelompok elit NU sangatlah penting dan bisa jadi efektif. Karena mobilisasi dari tingkat elit tidak muncul, maka bisa

⁵ Setelah Gus Dur dilengserkan oleh SI (Sidang Istimewa MPR) pada 2001, terjadi perpecahan di tubuh PKB karena pembelotan yang dilakukan oleh Matori Abdul Jalil. PKB pecah menjadi dua kubu, PKB Kuningan (yang direstui oleh Gus Dur) dan PKB Batu Tulis (pimpinan Matori).

dikatakan diskursus intelektual di dalam NU tidak begitu menonjol, bahkan mengalami kemunduran besar apabila dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Patut menjadi pertimbangan di sini bahwa ketika NU dipimpin oleh Abdurrahman Wahid, mobilisasi diskursus intelektual dalam NU begitu terasa gemanya. Tokoh ini berhasil menggunakan kedudukannya untuk memobilisasi isu-isu penting yang berkaitan dengan Islam, politik, dan hak asasi manusia untuk didiskusikan secara intensif dan meluas di lingkungan masyarakat NU. Beberapa isu penting yang dilontarkan misalnya adalah pribumisasi Islam, penghormatan terhadap hak-hak minoritas, demokratisasi, dan masih banyak lagi. Meskipun oleh sebagian warga NU ide-ide yang dilontarkan Gus Dur belum bisa diterima—bahkan ditentang, namun paling tidak mereka yang belum bisa menerima dan masih menentang tersebut berpikir untuk mencari argumen mengapa mereka masih belum bisa menerima dan menentang. Ini merupakan proses yang baik, karena dengan demikian terjadi dialog intelektual di dalamnya.

Pada masa kepemimpinan KHM. Sahal Mahfudz dan Hasyim Muzadi, hal seperti di atas sangat langka, bahkan tidak didapatkan oleh kaum *nahdliyyin*. Sahal Mahfudz memiliki reputasi intelektual

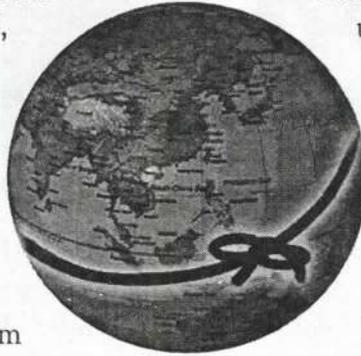
yang sangat tinggi, namun karena kehati-hatiannya untuk tidak menciptakan kontroversi, maka ia lebih banyak memilih diam. Meskipun ia memiliki ide brilian tentang perlunya pembaharuan fiqih (fiqih sosial), namun karena perasaannya yang halus, Sahal Mahfudz lebih suka melontarkannya di audien-audien terbatas seperti kepada kelompok perguruan tinggi.⁶ Ia tidak mau menggunakan otoritasnya yang tinggi—baik sebagai seorang ulama yang sangat dalam ilmunya maupun sebagai Rais Am Syuriah NU—untuk menyebarkan secara luas gagasan-gagasannya di lingkungan pesantren. Sedangkan Hasyim Muzadi yang kapasitas intelektualnya tidak bisa dibandingkan dengan Gus Dur tidak banyak mengusulkan ide-ide baru di dalam diskursus intelektual Islam. Ia hanyalah tipologi seorang aktivis murni.

Sebenarnya Hasyim bisa menutupi kelemahannya ini dengan cara melakukan aliansi dengan kelompok intelektual NU yang sudah mulai terbentuk yang lebih banyak berada di jalur non-struktural NU, seperti di kelompok LSM-LSM NU di Jakarta, Yogyakarta, atau di tempat-tempat lain. Sayangnya, selama kepemimpinannya, hubungan Hasyim dengan kelompok ini tidak nampak begitu menonjol. Mungkin Hasyim memiliki pandangan bahwa beraliansi dengan kelompok non-struktural tidak strategis untuk pengembangan lembaga ini mengingat zamannya memang

⁶ Baru-baru ini Sahal Mahfudz mendapatkan gelar *Doctor Honoris Causa* dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan topik pidato pengukuhan tentang "*Fiqih Sosial: Upaya Pengembangan Madzhab Qauli dan Manhaji*".

sudah berbeda. Selain itu, ada kesan bahwa Hasyim nampaknya ingin tampil memimpin NU secara berbeda dengan kepemimpinan Gus Dur yang pada era kepemimpinannya lebih banyak berurusan dengan kelompok-kelompok NU jalur kultural. Hasyim tidak menyadari bahwa selama ini kebangkitan intelektualitas NU tidak bisa banyak berharap pada kekuatan struktural NU, karena orang yang duduk dalam struktur NU biasanya memiliki kesibukan dengan urusan organisasi, *lobby-lobby* politik, dan lain sebagainya.

Meskipun demikian, selama kepemimpinan Hasyim ada dua peristiwa penting yang berkaitan dengan pengembangan diskursus intelektual NU. *Pertama*, Muktamar Pemikiran NU yang diselenggarakan oleh aliansi kelompok “intelektual muda” NU di pesantren Situbondo. Meskipun mendapat tentangan dari kelompok sayap muda NU kultural lainnya,⁷ namun muktamar pemikiran ini cukup baik untuk mengingatkan kembali upaya intelektual



yang pernah dikembangkan oleh organisasi ini beberapa periode lalu. Peristiwa yang *kedua* adalah konferensi internasional yang mengusung tema “Islam sebagai Rahmatan li al-‘Alamin” yang diselenggarakan di Jakarta.⁸ Konferensi yang mendapat dukungan penuh dari rezim Megawati ini sangat berguna untuk

meneguhkan kembali upaya-upaya *networking* pada tingkat internasional yang pernah dilakukan pada masa kepemimpinan Gus Dur. Namun, dua peristiwa penting di atas tidak cukup dijadikan alasan untuk mengatakan bahwa NU mengalami perkembangan yang lebih baik dibanding

dengan periode-periode sebelumnya.

Civil Society

Civil society (CS) adalah aspek lain yang ingin dilihat dari NU selama lima tahun terakhir dalam tulisan ini. Kita hampir tidak bisa menyangkal bahwa selama ini sumbangan kelompok CS bagi

⁷ Kesan ketidaksetujuan kelompok Yogyakarta (LKIS) atas penyelenggaraan Muktamar Pemikiran tersebut terlihat pada tulisan Muhkotib yang dimuat oleh *Harian Kompas*, 3 Oktober 2003, yang berjudul “Sesat Pikir Muktamar Pemikiran”. Penilaian tentang Muktamar Pemikiran NU ini agak terbatas karena pada saat penyelenggaraan acara tersebut penulis sedang mengikuti *fellowship* di East-West Center Hawaii, Amerika Serikat sehingga tidak bisa mengikuti jalannya acara tersebut secara langsung. Ketidaksetujuan intelektual muda dan aktivis NU di Yogyakarta, terutama yang dimotori oleh LKIS terlihat dari ketidakhadiran mereka di arena muktamar.

⁸ Konferensi tersebut sebetulnya mendapat fasilitas penuh dari Departemen Luar Negeri RI. Dukungan seperti ini tidak hanya terjadi pada NU akan tetapi juga pada Muhammadiyah. Muhammadiyah akan melaksanakan konferensi internasionalnya pada sekitar awal Desember 2004. Melihat kenyataan demikian, ini semacam penjatahan bagi masing-masing organisasi besar.



perkembangan NU sangatlah besar. Citra NU secara tajam berubah setelah dalam masa yang panjang berada dalam citra “negatif”⁹ karena kiprah politiknya beberapa waktu yang lampau. Selama pertengahan delapan puluhan dan sembilan puluhan, organisasi ini mendorong munculnya kelompok-kelompok di dalam masyarakatnya untuk menciptakan “*public sphere*”. Dekade 80 dan 90-an adalah masa penting bagi eksistensi kelompok ini, di mana pada masa inilah kelompok-kelompok CS di dalam NU sudah mulai memasuki pergaulan mereka dengan kelompok-kelompok sejenis di luar NU. Aliansi Gus Dur dengan kelompok pro-demokrasi sangat membantu para aktivis dan intelektual muda NU untuk bertukar pikiran dan menjalin kerja sama dengan

kelompok-kelompok kritis di luar NU. Sebagaimana kita tahu bahwa kelompok-kelompok kritis di luar NU pada masa itu lebih banyak didominasi oleh kelompok sekular. Karena itu, bergabungnya kelompok CS NU ke dalam lingkungan mereka sebenarnya sangat membantu mereka terutama dalam hal pengenalan masalah-masalah agama dan melalui NU ide demo-

krasi dan HAM juga bisa ditransformasikan lebih lanjut ke kelompok agama di lingkungan NU, terutama untuk kalangan pesantren.

Dalam lima tahun terakhir (1999-2004) ini, peran NU secara organisasi dalam mengembangkan CS masih berlanjut, namun intensitasnya tidak bisa dikatakan melebihi dari tiga periode sebelumnya. Ada beberapa hal yang membedakan periode ini dengan tiga periode sebelumnya. *Pertama*, situasi politik yang dihadapi NU pada era reformasi ini berbeda dengan situasi yang dihadapi oleh kepemimpinan NU pada masa sebelumnya. Pada lima tahun terakhir, apalagi dampak dari kepresidenan Gus Dur, keberadaan NU menjadi sangat penting untuk diperhatikan.

⁹ Organisasi ini memiliki citra yang bermacam-macam akibat peran yang dilakukannya. Citra itu antara lain adalah NU sebagai organisasi kaum sarungan (citra pedesaan dan kekolotan), oportunist (citra ingin untung sendiri), akomodasionis (citra menurut pada *status quo*), dan lain sebagainya. Lihat Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama*, (LKIS: Yogyakarta, 2003).

Organisasi dengan basis massa tradisional yang memiliki kecenderungan patuh pada pemimpin mereka menjadi pertimbangan sendiri bagi penguasa dan partai politik dalam sebuah sistem pemilihan langsung. Situasi politik yang demikian dibarengi dengan model kepemimpinan NU yang memiliki orientasi pragmatis dan realistik. Bertemunya situasi politik yang demikian dan orientasi kepemimpinan yang pragmatis inilah yang menuntun NU memiliki orientasi pragmatis juga.

Kedua, situasi di dalam NU struktural sendiri nampaknya tidak mencerminkan paradigma yang jelas mengenai pengembangan CS. Yang saya maksud dengan paradigma pengembangan CS yang jelas ini adalah tersedianya konsep mengenai model pengembangan masyarakat yang dikehendaki dan berpihak pada kaum *nahdliyyin*. Secara retorik, NU struktural memang masih memiliki keinginan yang kuat untuk mengembangkan CS di dalam masyarakat mereka. Namun karena ketidakjelasan konsep CS yang dipilih menyebabkan seolah-olah NU mengabaikan pengembangan CS. Hal ini berbeda dengan pola pengembangan CS pada masa kepemimpinan Gus Dur, di mana Gus Dur secara sistematis dan berlanjut berusaha meletakkan NU sebagai “kekuatan” di luar negara. Tidak hanya menja-

dikan NU sebagai kekuatan di luar negara, Gus Dur juga berusaha membentuk NU berbeda dengan organisasi-organisasi sosial dan keagamaan lain yang disponsori oleh negara seperti ICMI. Secara teoritis, apa yang dilakukan oleh Gus Dur bisa dikatakan sebagai model pengembangan CS madzhab negatif.¹⁰ Kepemimpinan Hasyim nampaknya mendudukkan NU dalam posisi yang “abu-abu”. Artinya, apakah NU mau diletakkan di luar kekuatan negara ataukah menjadi kekuatan kompromis. Bisa jadi kepemimpinan NU pada era Hasyim Muzadi memiliki agenda meletakkan NU di tengah-tengah: yaitu antara menjadi kompromis dan oposisi. Pilihan demikian sebenarnya sangat ideal karena menjadikan NU sebagai kekuatan yang netral. Namun apabila hal ini tidak bisa dilaksanakan secara maksimal, maka pilihan ini sangat gampang menggelincirkan NU ke dalam posisi yang oportunistik. Apa yang terjadi dalam NU selama lima tahun terakhir ini nyaris meneguhkan kembali citra oportunistik NU tersebut.

Atau mungkin saja paradigma pengembangan CS di era kepemimpinan Hasyim mengikuti pendekatan Hegelian. Menurut Hegel, kekuatan CS tidak berarti harus berada di luar negara. Kekuatan ini bisa membantu negara, karena negara

¹⁰ Madzhab negatif CS ini merujuk kepada model pengembangan CS yang menganut pada aliran Marxisme di mana kelompok CS tidak bisa berada di dalam negara. Sebagai kekuatan kontrol, kelompok CS harus berada di luar kekuatan negara. Lihat, Jean L. Cohen, *Class and Civil Society: The Limit of Marxian Critical Theory*, (University of Massachusetts Press: Amherst, 1982), terutama pada bab I, “Civil Society and Its Discontents”.

pada dasarnya bukan kekuatan yang negatif.¹¹ Artinya, posisi NU tidak mengharamkan untuk bekerja sama dengan kekuatan negara. Namun, karena Hasyim tidak memberikan ketegasan konseptual dalam paradigma pengembangan CS, maka Hasyim seolah berada dalam posisi yang tidak jelas dalam konteks pengembangan CS di tubuh NU. Padahal, kejelasan paradigma pengembangan CS yang dipilih Hasyim ini sangat penting untuk dinyatakan kepada masyarakat NU karena masyarakat NU selama kurang lebih lima belas tahunan sudah dibentuk secara sistematis oleh Gus Dur untuk memposisikan diri sebagai kekuatan di luar negara. Pandangan demikian sudah berurat nadi dalam masyarakat NU. Oleh karena itu, kedatangan Hasyim memimpin NU dengan membawa paradigma yang berbeda dengan Gus Dur tanpa adanya penjelasan yang kuat menyebabkan resistensi, atau paling tidak kepemimpinanannya tidak *legitimate*, karena pengembangan CS yang benar menurut masyarakat NU adalah model yang dikembangkan oleh Gus Dur.

Ketiga, salah satu faktor lain yang menyebabkan mengapa gerakan CS menurun adalah karena energi yang dimiliki NU banyak tersedot ke dalam gerakan-gerakan politik formal, tidak hanya dengan partai-partai NU, akan tetapi juga dengan partai-partai lainnya

seperti PDIP dan P. Golkar. Kasak-kusuk setahun terakhir tentang pencalonan Hasyim menjadi wakil presiden berpasangan dengan Megawati memiliki implikasi pada gerak mesin NU sebagai *jam'iyah*. Meskipun menggunakan alasan pribadi, karena lembaga NU tidak berpihak, namun pencalonan ini mau tidak mau melibatkan NU sebagai organisasi untuk mendukung Hasyim. Kenyataan ini kemudian melahirkan kecurigaan dari pelbagai kalangan bahwa Hasyim mempolitikasi NU karena kapasitasnya sebagai ketua PBNU yang resmi. Meskipun non-aktif, dalam kenyataannya di lapangan, Hasyim dan tim suksesnya memang terlihat benar menggarap warga NU sebagai sasarannya. Pencalonan wakil presiden ini bukanlah pekerjaan CS, namun pekerjaan politik. Karena itu, dalam waktu kurang lebih setahun terakhir ini, organisasi NU dikerahkan untuk melakukan kerja-kerja politik. Dengan demikian, kerja-kerja CS menjadi tertinggal.

Meskipun demikian, keterlibatan NU dalam gerakan CS tidak sama sekali hilang dalam lima tahun terakhir ini. Gerakan ini lebih banyak dipelopori oleh sayap kultural NU, misalnya LKiS (Lembaga Kajian Islam dan Sosial) Yogyakarta, P3M Jakarta, eLSAD Surabaya, "Lakpesdam NU" dan seluruh cabang Lakpesdam NU di seluruh Indonesia, Fahmina Institute Cirebon, Sarikat Yogyakarta, Wahid In-

¹¹ Inilah yang disebut dengan madzhab positif dalam pengembangan CS yang merujuk kepada Hegel. Lihat pada bab yang sama atas buku Jean L. Cohen.

stitute, Puan Amal Hayati, dan masih banyak lagi, adalah contoh dari lembaga-lembaga non-struktural NU.¹² Semenjak terpilihnya Hasyim menjadi ketua PBNU, nampaknya sayap kultural NU tidak banyak terlibat komunikasi secara formal dengan kepengurusan NU. Pada saat yang sama, pihak PBNU sendiri seolah-olah menutup komunikasi dengan kelompok jalur kultural ini. Kalau kita boleh menyesali, titik inilah yang sebenarnya perlu dirawat oleh Hasyim Muzadi, dan sayangnya ini tidak dilakukannya.¹³

Politik

Tidak ada hal yang paling menyedot perhatian NU struktural dalam lima tahun terakhir dibandingkan persoalan-persoalan politik. Menurut catatan saya, ada dua hal penting yang menyebabkan mengapa hal ini terjadi. *Pertama*, berkaitan dengan pendirian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Muktamar NU ke-30 di Kediri, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan PKB, namun Muktamar merekomendasikan agar warga NU mendukung partai yang dilahirkan dan memiliki kaitan sejarah dengan NU. Jelas yang dimaksud dengan butir rekomendasi

ini adalah PKB. Rekomendasi ini muncul tidak hanya terkait dengan Pemilu 2004, namun juga terkait dengan dukungan pengamanan atas kursi kepresidenan Gus Dur. Kepresidenan Gus Dur harus mendapat dukungan penuh dari PKB mengingat hanya partai inilah yang menjadi modal utama Gus Dur. Melalui forum yang paling besar dan dihormati dalam tradisi NU—yaitu Muktamar—para warga *nahdliyyin* secara simbolik diberitahu bahwa para wakil mereka di DPR dan MPR yang tergabung dalam PKB harus mendukung Gus Dur. Apabila terjadi pembelotan dari anggota parlemen, maka yang akan memberi sanksi tidak hanya pemimpin partai, akan tetapi juga para pemilih mereka secara keseluruhan. Dengan rekomendasi ini pula, NU—meskipun bukan lembaga politik—menjadi terikat untuk mendukung kepresidenan Gus Dur.

Situasi seperti ini jelas menimbulkan komplikasi-komplikasi politik yang membingungkan bagi kepengurusan NU di zaman Hasyim Muzadi. Harus diakui pula, Hasyim mewarisi situasi politis NU yang sangat rumit pasca Gus Dur, yaitu situasi remang-remang antara penega-

¹² Selain lembaga-lembaga yang memiliki kedekatan dengan ideologi NU, gerakan CS juga mendapat dorongan dari aktivis-aktivis NU yang tersebar di banyak lembaga yang sama sekali tidak memiliki kaitan dengan NU. Lakpesdam NU memiliki peranan yang sangat penting dalam mempertemukan pelbagai kelompok tersebut.

¹³ Ketertutupan Hasyim dengan kelompok ini misalnya terjadi pada saat kelompok yang bergabung dalam jaringan *Islam and Civil Society Organization* mencoba mencari dukungan moril dari Hasyim Muzadi selaku pemimpin NU untuk mendukung aktivitas kelompok ini dalam hal penentangan perang Iraq dan Amerika. Namun kelompok ini tidak berhasil menemuinya meskipun menurut sekretaris pribadinya sudah disediakan alokasi waktu untuk kelompok ini.

kan Khittah '26 dan politik kekuasaan. Ketika Gus Dur masih menjabat presiden, kepatuhan NU terhadap rekomendasi Mukhtamar Kediri masih bisa diharapkan efektifitasnya. Ketika itu, tidak dapat diingkari bahwa banyak pihak yang mendapatkan keuntungan, baik material maupun moral, termasuk kelompok-kelompok elit NU dari kepresidenan Gus Dur. Karena itu, imbalannya adalah dukungan pada Gus Dur secara penuh. Penggeseran Gus Dur dari singgasana kepresidenan membuat situasi berbeda. NU yang tadinya mendukung Gus Dur (PKB) secara penuh dengan menggunakan dalih netralitasnya berusaha secara pelan-pelan menarik dukungan politis atas nasib Gus Dur yang dilengserkan. Yang jelas, ambiguitas Hasyim begitu terlihat ketika menghadapi perpecahan yang terjadi di internal PKB; antara PKB pimpinan Alwi dan PKB pimpinan Matori Abdul Jalil. Pihak Gus Dur menghendaki agar Hasyim bersifat tegas untuk mengakui PKB Alwilah sebagai satu-satunya partai resmi NU, namun Hasyim tidak bisa memberikan tuntutan ini. Dari sini Hasyim Muzadi terasa sulit untuk lepas dari jebakan politik kekuasaan.

Kedua, lemahnya kepemimpinan NU pasca Gus Dur. Kelemahan kepemimpinan Hasyim Muzadi dalam NU yang paling mendasar adalah pada visi dan misi pengelolaan organisasi. Padahal pada bidang inilah *mandate* terbesar yang diharapkan dari kepemimpinan Hasyim selama lima tahun. Sebagaimana kita tahu

bahwa faktor yang paling kuat mendukung terpilihnya Hasyim menjadi ketua tanfidziyah PBNU dalam Mukhtamar Kediri 1999 adalah karena pada saat itu beredar kesan bahwa Hasyim adalah "jago manajemen organisasi" dengan bukti keberhasilannya mengelola NU di wilayah Jawa Timur. Diharapkan Hasyim mampu mengatur manajemen PBNU yang lebih baik, karena yang kurang dari NU waktu itu adalah aspek pengelolaannya. Namun, sebagian orang berpikir bahwa Hasyim sebenarnya lebih cocok memimpin PKB daripada NU. Pendapat ini didasarkan pada *track record* Hasyim yang pernah menjadi aktivis PPP dan juga kecenderungan politiknya yang kuat. Namun pada saat itu PKB sudah memiliki Matori Abdul Jalil dan kepemimpinannya lumayan, sehingga tidak ada alasan yang kuat untuk menggesernya.

Selama lima tahun kepemimpinan Hasyim, visi, misi, dan arah organisasi NU tidak terlihat. Apakah NU hendak diarahkan pada kerja-kerja pemberdayaan masyarakat yang menggunakan cara-cara non-politis ataukah mengembangkan masyarakat NU dengan menggunakan cara-cara politik. Di sini nampak kegamangan Hasyim. Pada satu sisi, ia ingin mengembangkan kerja-kerja pemberdayaan masyarakat, namun di sisi yang lain upaya tersebut diletakkan dalam kerangka kepentingan politiknya. Hasyim dan pendukungnya masih terbawa angan-angan aktivis lama NU yang selalu memiliki *mindset* politis bahwa NU harus memiliki peran dalam urusan politik dan

kenegaraan.¹⁴ Dalam pelbagai ceramahnya, juru kampanye Hasyim dari kubu NU selalu menggunakan angan-angan tersebut sebagai materi kampanye. “Mengapa harus memilih Hasyim, karena Hasyimlah yang paling memiliki harapan untuk mensejahterakan warga NU. Hasyimlah yang mewakili kepentingan NU.” Meskipun materi kampanye tersebut sangat dangkal, namun itu seolah-olah mengafirmasi Hasyim dalam mobilisasi NU sebagai kekuatan politik.

Ketiga, ketidakjelasan tafsir khittah 1926. Khittah ‘26 memang mampu membatasi NU dari gerakan politik praktis secara kelembagaan, namun Khittah ini tidak mampu membatasi anggota atau pengurus NU untuk tidak berpolitik praktis. Salah satu kelemahan Khittah ‘26 adalah tidak adanya aturan yang mengikat bagi anggota dan pengurus NU untuk tidak berpolitik praktis. Persoalan inilah yang melahirkan kritik dan keluhan dari banyak kalangan NU saat ini. Para pengurus NU yang memiliki kecenderungan berpolitik menggunakan celah ini untuk melegitimasi tindakannya. Aturan yang sebenarnya sudah lama dibuat ini dirasakan oleh banyak pihak sulit untuk dilaksanakan. Dengan dalih atas nama pribadi, pengurus NU cukup dengan cara non-aktif untuk melakukan aktifitas politiknya. Seolah-olah NU hanya menjadi batu pijakan bagi proses politik berikutnya. Namun hal yang perlu dipikirkan adalah apakah mungkin seseorang

kemudian dicalonkan untuk menjadi anggota parlemen atau presiden oleh kelompok tertentu tanpa adanya perhitungan akan basis massa yang dimiliki oleh orang yang dicalonkan tersebut. Dalam konteks calon-calon NU, terutama Hasyim Muzadi, sangat sulit dibayangkan untuk dinominasikan menjadi Cawapres dalam pemilu 2004 lalu tanpa “memanfaatkan” posisi strategisnya di NU.

Sebenarnya kritik secara tertulis yang dilayangkan kepada kepemimpinan NU sekarang atas kecondongannya untuk berpolitik sudah banyak dilontarkan oleh pelbagai kalangan, baik dari dalam maupun luar NU, namun ternyata kritik ini tidak mampu mengikis ambisi politik para pengurus PBNU untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Bahkan, dilihat dari retorika politik yang digunakan oleh kelompok politis dalam NU ini ada kesan seolah-olah mereka menentang segala kritik yang diarahkan kepada mereka, sehingga respons dari kalangan yang tidak setuju pun menjadi semakin keras. Untuk menanggapi “ke-kekeh-an” para politisi PBNU ini, kelompok muda yang tergabung dalam jalur kultural NU membentuk aliansi penegak khittah ‘26. Aliansi ini menyelenggarakan pelbagai kegiatan dari *lobby-lobby* sampai seminar yang tujuannya adalah mengkritisi arus politisasi yang begitu telanjang di dalam tubuh NU. Salah satu peristiwa yang sangat besar adalah dilaksanakannya Musyawarah

¹⁴ Tentang gambaran yang sangat menarik untuk melihat sejauh mana angan-angan politik yang dimiliki oleh para aktivis NU menggerakkan organisasi yang seharusnya non-politis menjadi politis adalah dalam Greg Fealy, *op.cit.*

Besar Warga NU di kompleks pesantren Babakan Cirebon awal Oktober 2004 lalu. Meskipun menuai kecaman yang luar biasa dari para pengurus PBNU karena beredar rumor bahwa Mubes ini merupakan tandingan bagi Mukhtamar NU XXXI di Solo, namun Mubes tetap berjalan sukses dan lancar. Ribuan peserta Mubes yang rata-rata adalah kalangan non-struktural NU, datang dari pelbagai daerah untuk membicarakan nasib NU selama lima tahun terakhir ini. Hal yang paling penting dari peristiwa ini adalah warga NU memiliki forum yang bisa dijadikan sebagai kritik terhadap kepemimpinan NU formal di mana selama ini aspirasi *nahdliyyin* terpotong dan terdistorsi oleh para pengurus formal.

Catatan Akhir

Situasi lima tahun terakhir sudah cukup untuk memberikan gambaran kepada kita pilihan mana yang terbaik yang akan ditempuh oleh NU untuk masa-masa yang akan datang. Menjadikan NU sebagai kekuatan politik yang selama lima tahun ini terjadi ternyata bukan merupakan pilihan yang tepat bagi NU, karena

jalan ini menjadikan NU sebagai organisasi yang berpihak. Pluralisme orientasi politik yang ada pada warga NU juga terkebiri karena upaya politisasi ini. Untuk masa-masa yang akan datang, selain melakukan peninjauan ulang atas konsep Khittah '26—khususnya mengenai persoalan netralitas NU, NU sebaiknya juga memikirkan mekanisme pengawasan organisasi apabila ada rencana untuk mengembalikan supremasi Syuriah. Dengan demikian, setelah Mukhtamar dan kepemimpinan baru terpilih, warga NU memiliki alat (saluran) untuk melakukan kritik yang simultan terhadap pengurus NU—baik Syuriah maupun Tanfidziyyah. Diharapkan ada semacam lembaga pengawas—dewan etik atau apa pun namanya—yang bertugas memberikan pengawasan terhadap Syuriah dan Tanfidziyyah. Karena, biar bagaimanapun kedua lembaga ini sangat mungkin untuk jatuh di dalam kesalahan. Karena itu, warga NU yang telah memilih melalui perwakilan masing-masing memiliki hak penuh untuk mengontrol mereka. Hal ini penting dilakukan untuk mendekatkan kembali hubungan NU dengan warganya. ■